

Kontestasi Ideologi Pendidikan Tinggi dalam Wacana Penutupan Program Studi: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Iqbal Asshidqi^{1*)}, Ahsanu Nadiya Elfara²⁾, & Amalia Khurin'in³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*) Email corresponding author: iqbalasshidqi2004@gmail.com

Abstrak

Polemik penutupan program studi di perguruan tinggi memunculkan perdebatan mengenai fungsi pendidikan tinggi antara orientasi industri dan fungsi publik. Kajian ini bertujuan mengungkap bagaimana wacana tentang pendidikan tinggi direpresentasikan serta bagaimana ideologi dan relasi kekuasaan bekerja dalam membentuk perbedaan wacana tersebut. Objek kajian berupa dua wacana opini di surat kabar Kompas, yaitu “*Yang Harus Ditutup Bukan Prodi*” karya Ahmad Arif dan “*Ketika Kampus Menjadi Pabrik*” karya Bondan Kanumoyoso. Analisis berfokus pada wacana sebagai sumber data utama tanpa melibatkan partisipan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, yang mencakup analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan simak catat, kemudian dianalisis berdasarkan representasi bahasa, strategi argumentasi, serta konteks sosial yang melatarbelakanginya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua wacana sama-sama mengkritik kebijakan penutupan program studi, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Ahmad Arif menekankan persoalan pada struktur industri yang tidak berbasis riset, sedangkan Bondan Kanumoyoso menyoroti risiko penyempitan fungsi universitas menjadi sekadar alat produksi tenaga kerja. Secara kualitatif, tampak adanya kontestasi antara ideologi pasar dan ideologi pendidikan sebagai institusi publik yang terlihat dari penggunaan diksi kritis dan metafora dalam membangun argumen pada kedua wacana.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Pendidikan Tinggi, Ideologi, Media, Norman Fairclough.

Abstract

The debate over closing academic programs in higher education has sparked broader questions about the role of universities, particularly between market-oriented goals and their public function. This study aims to explore how higher education is represented in public discourse and how ideology and power relations shape these competing narratives. The analysis focuses on two opinion pieces published in Kompas: “What Should Be Closed Is Not Study Programs” by Ahmad Arif and “When Universities Become Factories” by Bondan Kanumoyoso. The study relies on discourse as its primary data source and does not involve human participants. A qualitative descriptive approach is applied using Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis framework, which examines three dimensions: text, discursive practice, and social practice. Data are collected through documentation and close reading, then analyzed based on language representation, argumentative strategies, and the broader social context in which the texts are produced. The findings show that both texts criticize the policy of closing study programs, but from different perspectives. Ahmad Arif highlights structural issues within Indonesia’s industry, which he argues is not grounded in research and innovation. In contrast, Bondan Kanumoyoso emphasizes the risk of reducing universities to mere labor-producing institutions. Qualitatively, there appears to be a contestation between market ideology and the ideology of education as a public institution, as reflected in the use of critical diction and metaphors in constructing arguments within both discourses.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Higher Education, Ideology, Media, Norman Fairclough.

PENDAHULUAN

Pergeseran orientasi pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat ke arah logika pasar dan kebutuhan industri. Perguruan tinggi tidak lagi diposisikan semata sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan kesadaran kritis, melainkan semakin diarahkan sebagai institusi yang berfungsi menghasilkan tenaga kerja sesuai tuntutan ekonomi. Transformasi ini menandai perubahan fungsi kampus dari institusi publik menjadi bagian dari mekanisme produksi dalam sistem ekonomi yang lebih luas, di mana nilai pendidikan diukur berdasarkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya serap pasar kerja (Giroux, 2014, pp. 12–15). Dalam konteks tersebut, konsep “relevansi” tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat secara luas, tetapi direduksi menjadi kesesuaian dengan kebutuhan industri jangka pendek. Akibatnya, program studi yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomi langsung, seperti humaniora, ilmu sosial, dan pendidikan, kerap diposisikan kurang strategis dalam struktur pendidikan tinggi (Tilaar, 2012, pp. 85–88).

Kecenderungan tersebut tampak dalam wacana yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada 24 April 2026 dalam Simposium Nasional Kependidikan terkait rencana penutupan program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan cara pandang tertentu terhadap fungsi pendidikan tinggi, yakni sebagai penyedia tenaga kerja yang harus selaras dengan arah pembangunan ekonomi nasional. Wacana penutupan program studi tersebut kemudian memunculkan perdebatan di ruang publik, terutama melalui media massa. Media tidak sekadar menjadi saluran informasi, melainkan juga arena produksi dan pertarungan wacana yang membentuk opini publik. Dalam konteks ini, dua artikel opini di surat kabar Kompas, yakni “*Yang Harus Ditutup Bukan Prodi*” karya Ahmad Arif dan “*Ketika Kampus Menjadi Pabrik*” karya Bondan Kanumoyoso, memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang terhadap posisi pendidikan tinggi dalam masyarakat. Ahmad Arif menempatkan persoalan pada struktur industri Indonesia yang belum berbasis riset dan inovasi, sehingga ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri tidak semata-mata dapat dibebankan kepada kampus (Arif, 2026). Sebaliknya, Bondan Kanumoyoso memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk reduksi fungsi universitas menjadi sekadar alat produksi ekonomi yang tunduk pada kebutuhan industri, sehingga mengabaikan peran universitas sebagai institusi publik yang memiliki tanggung jawab sosial, intelektual, dan kultural (Kanumoyoso, 2026).

Perbedaan pandangan tersebut tidak hanya terletak pada isi argumen, tetapi juga pada cara bahasa digunakan untuk membangun realitas sosial tertentu. Bahasa dalam media tidak bersifat netral, melainkan merupakan praktik sosial yang memuat kepentingan, ideologi, dan relasi kekuasaan. Dalam perspektif Norman Fairclough, wacana dipahami sebagai arena produksi dan reproduksi makna sosial yang berlangsung melalui hubungan antara teks, praktik diskursif, dan praktik sosial yang lebih luas (Fairclough, 2010, pp. 3–6). Oleh karena itu, analisis terhadap kedua teks tersebut tidak cukup dilakukan pada tingkat isi atau pesan yang disampaikan, melainkan perlu menelaah bagaimana teks dibangun, bagaimana aktor sosial direpresentasikan, dan bagaimana ideologi tertentu dilegitimasi melalui pilihan bahasa. Pendekatan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkap bagaimana relasi antara bahasa dan kekuasaan bekerja dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap pendidikan tinggi di Indonesia.

Di sisi lain, secara normatif pendidikan tinggi di Indonesia tidak semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan tinggi bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, kreatif, mandiri, serta mampu

berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, 2012). Selain itu, pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai sarana pengembangan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Ketegangan antara orientasi normatif tersebut dan arah kebijakan yang cenderung berorientasi pasar menunjukkan adanya konflik ideologis dalam memaknai fungsi pendidikan tinggi. Konflik ini tidak hanya berlangsung pada tataran kebijakan, tetapi juga diproduksi dan direproduksi melalui wacana di media massa. Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana media membangun dan merepresentasikan wacana tentang pendidikan tinggi, khususnya dalam polemik penutupan program studi. Dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat produksi makna yang berkaitan dengan ideologi dan relasi kekuasaan dalam kontestasi makna pendidikan tinggi di Indonesia.

Sejauh ini, kajian mengenai pendidikan tinggi di Indonesia cenderung berfokus pada aspek kebijakan, tata kelola, serta keterkaitan antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Rosyada menunjukkan bahwa reformasi pendidikan tinggi lebih diarahkan pada peningkatan daya saing lulusan di pasar global, terutama melalui pengembangan kurikulum berbasis industri (Rosyada, 2019, pp. 145–147). Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Nizam yang menekankan pentingnya hubungan antara perguruan tinggi dan dunia usaha sebagai upaya meningkatkan relevansi pendidikan tinggi (Nizam, 2020, pp. 12–14). Namun, kajian yang secara khusus membedah bagaimana wacana pendidikan tinggi dikonstruksi dalam media massa, terutama melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis, masih relatif terbatas. Padahal, media memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang publik terhadap arah dan fungsi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough untuk mengungkap relasi antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam wacana penutupan program studi di media massa.

Fokus kajian diarahkan pada analisis kontestasi ideologi pendidikan tinggi yang direpresentasikan dalam dua artikel opini di surat kabar Kompas, yaitu “*Yang Harus Ditutup Bukan Prodi*” karya Ahmad Arif dan “*Ketika Kampus Menjadi Pabrik*” karya Bondan Kanumoyoso. Berdasarkan latar tersebut, pertanyaan yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana wacana tentang fungsi pendidikan tinggi direpresentasikan dalam kedua teks opini tersebut, serta bagaimana perbedaan representasi tersebut mencerminkan pertarungan ideologi dalam memaknai peran pendidikan tinggi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengungkapan makna, ideologi, dan relasi kekuasaan yang terkandung dalam wacana media, khususnya dalam wacana penutupan program studi di perguruan tinggi (Fairclough, 2010, pp. 7–9). Objek penelitian ini adalah dua artikel opini yang dimuat dalam surat kabar Kompas, yaitu “*Yang Harus Ditutup Bukan Prodi*” karya Ahmad Arif dan “*Ketika Kampus Menjadi Pabrik*” karya Bondan Kanumoyoso. Data penelitian berupa kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf yang menunjukkan representasi pendidikan tinggi, posisi kampus, relasi industri, serta ideologi yang dibangun dalam kedua wacana tersebut. Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kedua artikel opini tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, undang-undang, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian pendidikan tinggi dan Analisis Wacana Kritis (Sugiyono, 2017, pp. 224–226).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi serta simak catat. Peneliti membaca kedua wacana secara cermat, mengidentifikasi bagian-bagian yang berkaitan

dengan tema penelitian, kemudian mencatat data yang relevan untuk dianalisis (Moleong, 2018, pp. 186–189). Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan model Fairclough yang mencakup tiga dimensi, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pada tahap analisis wacana, data dikaji melalui pilihan diksi, struktur kalimat, kohesi, dan strategi representasi. Pada tahap praktik diskursif, dianalisis proses produksi dan konsumsi teks, termasuk konteks kemunculan opini dalam ruang media. Pada tahap praktik sosial, ditelaah hubungan teks dengan konteks sosial yang lebih luas, yakni wacana pendidikan tinggi, orientasi pasar, dan relasi kuasa dalam kebijakan pendidikan (Fairclough, 1992, pp. 73–75). Keabsahan data dijaga melalui ketekunan pengamatan dan pembacaan berulang terhadap wacana serta pencocokan dengan sumber-sumber pendukung yang relevan (Moleong, 2018, pp. 327–330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dua wacana opini yang mengangkat polemik penutupan program studi dalam pendidikan tinggi di Indonesia yakni; wacana pertama berjudul *“Yang Harus Ditutup Bukan Prodi”* karya Ahmad Arif, sedangkan wacana kedua berjudul *“Ketika Kampus Menjadi Pabrik”* karya Bondan Kanumoyoso. Keduanya muncul sebagai respons terhadap wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengenai rencana penutupan program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri masa depan (Arif, 2026; Kanumoyoso, 2026).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis dari Norman Fairclough. Dalam kerangka ini, wacana dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu wacana, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pada dimensi wacana, analisis diarahkan pada penggunaan bahasa, seperti pilihan kata, struktur kalimat, metafora, dan strategi argumentasi. Pada dimensi praktik diskursif, perhatian diberikan pada bagaimana wacana diproduksi, disebarkan, dan diterima oleh pembaca. Sementara itu, pada dimensi praktik sosial, analisis difokuskan pada hubungan antara wacana dengan ideologi, relasi kekuasaan, serta kondisi sosial yang melatarbelakanginya (Fairclough, 1995, pp. 97–100).

Kedua wacana ini tidak hanya berisi pendapat mengenai kebijakan pendidikan, tetapi juga membangun cara pandang tertentu tentang hubungan antara kampus, industri, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, wacana tidak cukup dipahami sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai ruang di mana makna diproduksi dan dipertentangkan. Melalui analisis ini, dapat dilihat bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk realitas sosial sekaligus mencerminkan pertarungan ideologi dalam memahami fungsi pendidikan tinggi.

1. Representasi Pendidikan Tinggi dalam Wacana Ahmad Arif

Dalam wacana *“Yang Harus Ditutup Bukan Prodi”*, Ahmad Arif menggambarkan pendidikan tinggi sebagai ruang ilmu yang justru disalahkan oleh kebijakan negara. Hal ini terlihat sejak kalimat pembuka berupa *“Menutup program studi tidak akan menyelesaikan masalah jika industri kita sejak awal tidak pernah membutuhkan ilmu pengetahuan.”* Kalimat ini langsung menggeser fokus persoalan. Pemerintah menyoroti program studi, tetapi penulis mengarahkan perhatian pada struktur industri sebagai sumber masalah utama. Pilihan kata dalam wacana tersebut berupa *“diagnosis yang keliru”*, *“akar masalah”*, *“lingkaran setan”*, dan *“kebijakan yang terbalik”* menunjukkan bahwa penulis tidak hanya tidak setuju, tetapi juga menilai kebijakan tersebut sebagai kesalahan mendasar. Istilah *“diagnosis”* umumnya digunakan dalam dunia medis. Dengan menggunakan istilah ini, kebijakan pemerintah digambarkan seperti kesalahan dokter dalam membaca penyakit. Jika diagnosis salah, maka solusi yang diambil juga akan salah.

Ahmad Arif juga membangun pertentangan antara ilmu pengetahuan dan industri berbiaya rendah. Ia menegaskan bahwa industri Indonesia tidak dibangun untuk membutuhkan

ilmu, tetapi untuk memanfaatkan tenaga kerja murah. Dalam kasus ini, kampus ditempatkan sebagai pihak yang dirugikan oleh struktur ekonomi yang tidak berbasis riset. Masalahnya bukan karena kampus terlalu banyak mengajarkan ilmu, tetapi karena industri tidak membutuhkan ilmu tersebut. Argumen dalam wacana ini diperkuat dengan penggunaan data ekonomi. Penulis menampilkan data R&D serta perbandingan dengan negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, ia juga merujuk pada teori *absorptive capacity* untuk menunjukkan bahwa industri Indonesia belum mampu menyerap pengetahuan. Penggunaan data dan teori ini membuat kritik yang disampaikan terlihat rasional dan berbasis analisis, bukan sekadar opini (Cohen & Levinthal, 1990, pp. 128–152).

Meski demikian, wacana ini tetap memiliki posisi ideologis tertentu. Pendidikan tinggi dipandang penting karena berkaitan dengan riset, inovasi, dan penguatan industri. Artinya, Ahmad Arif tidak menolak hubungan antara kampus dan industri. Ia justru menolak kebijakan penutupan program studi sebagai solusi instan. Bagi Ahmad Arif, masalah utama bukan pada keberadaan program studi, tetapi pada struktur industri yang belum mendukung perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Representasi Pendidikan Tinggi dalam Wacana Bondan Kanumoyoso

Berbeda dengan pandangan Ahmad Arif, Bondan Kanumoyoso dalam wacana "*Ketika Kampus Menjadi Pabrik*" merepresentasikan pendidikan tinggi sebagai institusi publik yang memiliki fungsi sosial, intelektual, dan kebudayaan. Judul wacana ini terlihat memiliki fokus ideologis yang mampu dipahami secara langsung. Frasa "*kampus menjadi pabrik*" adalah metafora tajam. Kampus digambarkan sedang direduksi menjadi tempat produksi tenaga kerja. Metafora "*pabrik*" menunjukkan kritik terhadap cara berpikir industrial dalam pendidikan. Pabrik menghasilkan barang secara massal, seragam, dan mengikuti kebutuhan pasar. Jika kampus disamakan dengan pabrik, maka mahasiswa berisiko diperlakukan sebagai produk, dosen sebagai operator, dan kurikulum sebagai mesin produksi. Ini merupakan kritik Bondan dalam wacananya terhadap logika pendidikan yang dianggap terlalu pragmatis.

Bondan menggunakan banyak diksi normatif berupa "*warga negara yang kritis*", "*berbudaya*", "*kompleksitas kehidupan sosial*", "*solidaritas sosial*", dan "*masyarakat demokratis*". Pilihan diksi ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya dipahami sebagai alat ekonomi, tetapi sebagai ruang pembentukan manusia dan masyarakat. Dalam Wacana ini juga mempertanyakan konsep "*relevansi*" pendidikan tinggi. Pertanyaan "*relevan bagi siapa dan untuk kepentingan apa?*" menjadi inti kritik Bondan dalam wacana tersebut. Ia menunjukkan bahwa istilah "*relevansi*" tidak netral. Istilah itu bisa menjadi alat kekuasaan untuk menentukan ilmu mana yang dianggap berguna dan ilmu mana yang dianggap tidak berguna. Bondan membangun representasi pendidikan tinggi sebagai ruang publik yang harus menjaga keberagaman pengetahuan. Program studi Humaniora, seni, sastra, filsafat, sejarah, dan ilmu sosial dinilai tidak memiliki keuntungan ekonomi secara langsung, tetapi dari kontribusinya terhadap demokrasi, kebudayaan, dan kemampuan masyarakat bidang ini mampu memahami dirinya sendiri dalam keberlangsungan hidup masyarakat.

3. Produksi dan Penyebaran Wacana

Dalam dimensi praktik diskursif, wacana dipahami sebagai produk sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari konteks tertentu dan ditujukan kepada pembaca dengan tujuan tertentu. Kedua wacana ini yang dimuat dalam surat kabar *Kompas*, sebuah media arus utama yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik di Indonesia. Posisi *Kompas* sebagai media nasional memberikan legitimasi terhadap wacana yang disampaikan, sehingga tulisan yang dimuat tidak hanya dibaca sebagai opini pribadi, tetapi sebagai bagian dari diskursus publik yang lebih luas. Sebagai wacana opini, kedua tulisan ini tidak sekadar

melaporkan peristiwa, tetapi juga menyusun tafsir terhadap kebijakan penutupan program studi. Melalui struktur argumentasi, pilihan data, dan gaya bahasa, masing-masing penulis berusaha memengaruhi cara pembaca memahami persoalan pendidikan tinggi. Wacana dalam hal ini, berfungsi sebagai sarana untuk membangun perspektif tertentu, bukan sekadar menyampaikan informasi.

Ahmad Arif menulis dari posisi sebagai jurnalis yang mengandalkan data empiris dan rujukan akademik. Ia menggunakan laporan global, statistik riset dan pengembangan, serta teori ekonomi untuk memperkuat argumennya. Strategi yang digunakan bersifat argumentatif dan berbasis bukti, sehingga membangun citra sebagai penulis yang rasional dan kredibel. Arah argumennya jelas, yaitu menunjukkan bahwa kebijakan penutupan program studi tidak menyentuh akar persoalan. Menurutnya, masalah utama terletak pada lemahnya ekosistem riset dan inovasi dalam industri Indonesia yang belum mampu menyerap ilmu pengetahuan. Di sisi lain, Bondan Kanumoyoso menulis dari posisi akademisi dan sejarawan dengan pendekatan yang berbeda. Ia tidak bertumpu pada data ekonomi, tetapi pada refleksi sosial, historis, dan nilai-nilai kemanusiaan. Strategi yang digunakan bersifat interpretatif dan kritis. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang fungsi universitas, masa depan masyarakat, serta makna pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya menolak kebijakan penutupan program studi, tetapi juga mengkritik cara berpikir yang menjadikan kebutuhan pasar sebagai ukuran utama dalam pendidikan.

Perbedaan latar belakang dan posisi sosial kedua penulis ini berpengaruh langsung terhadap cara wacana dibangun. Ahmad Arif menekankan persoalan pada struktur ekonomi dan industri, sehingga kampus diposisikan sebagai pihak yang terdampak oleh sistem yang tidak mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Sementara itu, Bondan lebih menyoroti perubahan cara pandang terhadap pendidikan tinggi, di mana kampus berisiko kehilangan fungsi sosial dan kulturalnya ketika terlalu tunduk pada logika industri. Meskipun pendekatan yang digunakan berbeda, keduanya memiliki titik temu dalam kritik terhadap kebijakan penutupan program studi. Perbedaannya terletak pada cara pandang arah kritik. Ahmad Arif berangkat dari analisis struktural terhadap industri, sedangkan Bondan berangkat dari refleksi normatif mengenai peran universitas dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa wacana yang dibangun tidak bersifat netral, tetapi dipengaruhi oleh posisi, kepentingan, dan kerangka berpikir masing-masing penulis.

Dalam perspektif Norman Fairclough, praktik diskursif berkaitan erat dengan proses produksi dan konsumsi wacana (Fairclough, 1995, pp. 71–73). Wacana tidak hanya diproduksi oleh penulis, tetapi juga diinterpretasikan oleh pembaca dalam konteks sosial tertentu. Pembaca tidak sekadar menerima informasi, melainkan diarahkan untuk memahami persoalan melalui sudut pandang yang telah dibentuk dalam wacana. Wacana Ahmad Arif cenderung mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa persoalan utama pendidikan tinggi tidak terletak pada program studi, tetapi pada struktur industri yang tidak berbasis ilmu pengetahuan. Sementara itu, wacana Bondan mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa isu ini memiliki dampak yang lebih luas, terutama terhadap masa depan demokrasi, kebudayaan, dan posisi universitas sebagai institusi publik.

Melalui uraian ini, terlihat bahwa praktik diskursif dalam kedua wacana tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pendapat, tetapi juga sebagai proses aktif dalam membentuk cara berpikir pembaca terhadap kebijakan pendidikan tinggi dan arah perkembangan masyarakat.

4. Ideologi dan Relasi Kekuasaan

Dimensi praktik sosial pada kedua wacana tersebut menunjukkan adanya pertarungan ideologi dalam memaknai fungsi pendidikan tinggi. Wacana yang muncul tidak semata berdiri netral, melainkan merefleksikan benturan antara dua cara pandang yang berbeda. Ideologi pertama adalah pendidikan berbasis pasar, yaitu cara pandang yang menilai keberadaan program studi berdasarkan kebutuhan industri, peluang kerja, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka ini, pendidikan tinggi dianggap berhasil jika mampu menghasilkan lulusan yang terserap oleh pasar kerja dan mendukung perkembangan sektor industri.

Di sisi lain, terdapat ideologi pendidikan sebagai institusi publik. Dalam sudut pandang ini, kampus tidak hanya berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja, tetapi sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan warga negara yang kritis, serta penjaga nilai-nilai kebudayaan. Pendidikan tinggi dipahami memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas, sehingga tidak dapat sepenuhnya tunduk pada kepentingan industri dan logika pasar. Kedua wacana yang dianalisis sama-sama mengkritik dominasi ideologi pasar, tetapi arah kritik yang dibangun berbeda. Ahmad Arif menolak kebijakan penutupan program studi karena dianggap berangkat dari cara membaca masalah yang keliru. Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada banyaknya program studi, melainkan pada struktur industri Indonesia yang belum berbasis riset dan inovasi. Dalam kondisi tersebut, industri tidak memiliki kebutuhan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan, sehingga penutupan program studi justru tidak menyelesaikan persoalan, bahkan berpotensi memperdalam masalah lain.

Sementara itu, Bondan Kanumoyoso mengajukan kritik dari sudut pandang yang berbeda. Ia menyoroti risiko yang lebih luas dari kebijakan tersebut, yaitu hilangnya fungsi publik universitas. Baginya, ketika pendidikan tinggi terlalu diarahkan pada kebutuhan pasar, kampus berpotensi kehilangan perannya sebagai ruang kritis dan kultural. Hal ini dapat mendorong lahirnya budaya pendidikan yang pragmatis, sempit, dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan serta keberagaman pengetahuan.

Relasi kekuasaan dalam wacana ini terlihat dari siapa yang memiliki otoritas dalam menentukan makna "*relevansi*" perguruan tinggi. Pemerintah dan industri berada pada posisi dominan karena memiliki kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan pendidikan tinggi, termasuk dalam menetapkan program studi mana yang dianggap penting. Sebaliknya, bidang ilmu seperti ilmu sosial, humaniora, seni, sastra, filsafat, dan sejarah berada dalam posisi yang lebih rentan, karena sering dinilai tidak memberikan keuntungan ekonomi secara langsung. Dalam konteks ini, wacana berfungsi sebagai alat kekuasaan. Istilah "*relevansi industri*" tampak netral dan rasional, tetapi sebenarnya mengandung kepentingan tertentu. Istilah tersebut digunakan untuk membenarkan kebijakan dan sekaligus membatasi ruang hidup disiplin ilmu tertentu. Melalui bahasa, batas antara ilmu yang dianggap penting dan tidak penting dibentuk secara sistematis.

Sesuai yang dikatakan Norman Fairclough bahwa bahasa tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan praktik sosial dan struktur kekuasaan (Fairclough, 1995, pp. 22–25). Oleh karena itu, wacana penutupan program studi tidak dapat dipahami hanya sebagai kebijakan teknis dalam pengelolaan pendidikan. Wacana ini merupakan bagian dari proses yang lebih luas, yaitu pertarungan untuk menentukan makna kampus dalam masyarakat, apakah sebagai alat produksi ekonomi atau sebagai institusi publik yang menjaga keberagaman pengetahuan dan kehidupan sosial.

5. Perbandingan Wacana dalam Kedua Wacana

Kedua wacana menunjukkan adanya kesamaan sekaligus perbedaan dalam memandang persoalan pendidikan tinggi. Keduanya sama-sama menolak penutupan program studi sebagai solusi utama, serta mengkritik cara berpikir yang menjadikan kebutuhan industri sebagai satu-satunya ukuran dalam menentukan arah pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua penulis tidak sepenuhnya menerima dominasi logika pasar dalam kebijakan pendidikan. Namun, arah kritik yang dibangun masing-masing penulis berbeda. Ahmad Arif lebih menekankan pada persoalan ekonomi-politik. Ia menunjukkan bahwa industri Indonesia belum berbasis riset dan inovasi, sehingga tidak tepat jika kampus dipaksa menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang pada dasarnya tidak membutuhkan ilmu pengetahuan. Dalam kerangka ini, kampus bukan sumber masalah, melainkan bagian dari sistem yang tidak berjalan dengan baik.

Sementara itu, Bondan Kanumoyoso mengajukan kritik yang lebih bersifat humanistik. Ia menyoroti bahaya penyempitan fungsi universitas ketika pendidikan tinggi hanya dipandang sebagai penyedia tenaga kerja. Bagi Bondan, universitas memiliki peran yang lebih luas, yaitu sebagai ruang pembentukan manusia, pengembangan pemikiran kritis, dan penjaga nilai-nilai kebudayaan. Dapat dikatakan bahwa wacana Ahmad Arif membangun argument *“yang bermasalah bukan prodi, tetapi struktur industri dan bisnis kampus yang rusak”*. Sedangkan wacana Bondan membangun argument *“yang berbahaya bukan hanya penutupan prodi, tetapi perubahan cara pandang terhadap universitas”*. Perbedaan ini menunjukkan kedua wacana tersebut memperlihatkan kontestasi ideologi pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi sedang ditarik ke dua arah. Di satu sisi, kampus diarahkan menjadi alat ekonomi. Di sisi lain, kampus dipertahankan sebagai institusi publik yang menjaga ilmu pengetahuan, nalar kritis, dan kebudayaan.

KESIMPULAN

Analisis terhadap kedua wacana menunjukkan bahwa polemik penutupan program studi tidak sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan pertarungan ideologi tentang fungsi pendidikan tinggi. Wacana Ahmad Arif menempatkan kampus sebagai ruang ilmu yang terdampak oleh lemahnya struktur industri yang tidak berbasis riset. Sebaliknya, Bondan Kanumoyoso menegaskan kampus sebagai institusi publik yang memiliki tanggung jawab sosial, intelektual, dan kebudayaan, serta mengkritik kecenderungan menjadikan kampus sebagai pabrik tenaga kerja. Melalui pendekatan Norman Fairclough, terlihat bahwa kedua wacana bekerja pada tiga dimensi. Pada tingkat teks, keduanya menggunakan diksi dan strategi argumentasi untuk membangun kritik. Pada tingkat praktik diskursif, keduanya membentuk tafsir publik melalui media. Pada tingkat praktik sosial, muncul kontestasi antara ideologi pasar dan ideologi pendidikan publik. Wacana pendidikan tinggi dalam kedua wacana tidak bersifat netral, melainkan menjadi arena pertarungan antara kepentingan industri, kebijakan negara, dan fungsi kampus dalam masyarakat. Kampus tidak hanya dipahami sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan makna dan arah masa depan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, pembuat kebijakan perlu memperluas makna *“relevansi”* pendidikan tinggi agar tidak hanya berorientasi pada kebutuhan pasar, tetapi juga mencakup fungsi sosial, kultural, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi juga perlu menjaga keseimbangan antara tuntutan industri dan perannya sebagai institusi publik, sehingga tidak terjebak pada orientasi pragmatis semata. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian, tidak hanya pada wacana media, tetapi juga pada kebijakan resmi maupun praktik di perguruan tinggi, agar analisis wacana dapat dikaitkan dengan kondisi yang lebih konkret dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Arif. (2026, April 28). *Yang harus ditutup bukan prodi*. Kompas, p. 6.
- Bondan Kanumoyoso. (2026, April 24). *Ketika kampus menjadi pabrik*. Kompas, p. 6.
- Wesley M Cohen, & Daniel A Levinthal. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.
- Norman Fairclough. (1992). *Discourse and social change*. Cambridge: Polity Press.
- Norman Fairclough. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Longman.
- Norman Fairclough. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Routledge.
- Henry A Giroux. (2014). *Neoliberalism's war on higher education*. Chicago, IL: Haymarket Books.
- Lexy J Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dede Rosyada. (2019). Pendidikan tinggi dan tantangan globalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(2), 145–147.
- Nizam. (2020). Link and match pendidikan tinggi dan dunia industri. *Jurnal Pendidikan Tinggi Indonesia*, 3(1), 12–14.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- H.A.R. Tilaar. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.